

**Pemberdayaan Pemuda dan Regenerasi Pengelola dalam Keberlanjutan
BUMDes Desa Wisata**Widyawati¹⁾¹⁾ Universitas Dr. Soetomo Surabaya¹⁾ email: widyawati@unitomo.ac.id**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan pemuda dan regenerasi pengelola dalam menjamin keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Wisata, dengan studi kasus pada BUMDes Bhinor Energi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Keberlanjutan BUMDes pengelola pariwisata kerap terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya kaderisasi pengelola, sehingga pelibatan pemuda menjadi strategis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Ketua BUMDes, Kepala Desa, pengurus POKDARWIS, dan pengelola muda, didukung observasi partisipatif dan dokumentasi. Analisis menggunakan kerangka pemberdayaan masyarakat lima dimensi (pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan) menurut Suharto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan pemuda dilakukan melalui pelibatan dalam pengelolaan unit usaha wisata, pelatihan berbasis program Corporate Social Responsibility (CSR), dan pemberian ruang kepemimpinan dalam POKDARWIS. Sekitar 65% pengelola aktif BUMDes berasal dari kelompok pemuda, dan keterlibatan ini mendorong inovasi layanan wisata serta transfer pengetahuan antargenerasi. Regenerasi pengelola berlangsung melalui mekanisme rekrutmen, pendampingan, dan estafet tanggung jawab yang menopang keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan desa wisata. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan pemuda yang terstruktur dan regenerasi pengelola yang terlembaga menjadi fondasi keberlanjutan BUMDes Desa Wisata, meskipun masih memerlukan penguatan kaderisasi formal dan jaminan insentif bagi pemuda.

Kata Kunci: Pemberdayaan Pemuda; Regenerasi Pengelola; Keberlanjutan BUMDes; Desa Wisata.

ABSTRACT

This study aims to analyze youth empowerment and managerial regeneration in ensuring the sustainability of Tourism-Village Village-Owned Enterprises (BUMDes), through a case study of BUMDes Bhinor Energi in Binor Village, Paiton District, Probolinggo Regency. The sustainability of tourism-managing

BUMDes is often constrained by limited human resources and weak managerial regeneration, making the involvement of youth strategic. This study employs a qualitative descriptive approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with the Head of BUMDes, the Village Head, the management of the tourism awareness group (POKDARWIS), and young managers, supported by participatory observation and documentation. The analysis uses the five-dimensional community empowerment framework (enabling, empowering, protecting, supporting, and fostering) proposed by Suharto. The results show that youth empowerment is carried out through their involvement in managing tourism business units, training based on Corporate Social Responsibility (CSR) programs, and the provision of leadership space within POKDARWIS. Approximately 65% of the active managers of the BUMDes come from the youth group, and this involvement drives innovation in tourism services and intergenerational knowledge transfer. Managerial regeneration takes place through mechanisms of recruitment, mentoring, and the transfer of responsibilities that sustain the economic, social, and environmental dimensions of the tourism village. The study concludes that structured youth empowerment and institutionalized managerial regeneration constitute the foundation of the sustainability of Tourism-Village BUMDes, although formal cadre development and incentive guarantees for youth still need to be strengthened.

Keywords: Youth Empowerment; Managerial Regeneration; BUMDes Sustainability; Tourism Village.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa dalam dua dekade terakhir mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan fisik-infrastruktural menuju penguatan ekonomi lokal berbasis potensi dan partisipasi masyarakat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan otoritas kepada desa untuk mengelola wilayahnya secara otonom, salah satunya melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 sampai Pasal 90. BUMDes diharapkan menjadi penggerak perekonomian desa dengan mengoptimalkan aset dan potensi lokal untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat (Permendesa Nomor 4 Tahun 2015).

Salah satu sektor yang berkembang pesat adalah desa wisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat peningkatan jumlah desa wisata dari 1.734 desa pada tahun 2018 menjadi lebih dari 7.200 desa pada tahun 2022. Namun, pertumbuhan kuantitatif ini tidak selalu diikuti oleh kualitas tata kelola yang memadai, sehingga sebagian besar desa wisata mengalami stagnasi atau bahkan berhenti beroperasi. Data Kementerian Desa menunjukkan bahwa BUMDes

pengelola pariwisata yang tergolong maju hanya berkisar 10–15%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan potensi, melainkan pada aspek tata kelola dan keberlanjutan kelembagaan (Rohim et al., 2022).

Aspek keberlanjutan BUMDes sangat erat kaitannya dengan kapasitas sumber daya manusia. Berbagai kajian menemukan bahwa keterbatasan kompetensi pengelola, lemahnya kaderisasi, dan ketergantungan pada figur tunggal menjadi penyebab utama kemunduran BUMDes ketika kepemimpinan berganti. Ketika pengelola senior tidak menyiapkan penerus, pengetahuan dan jejaring yang telah dibangun tidak terwariskan, sehingga keberlanjutan organisasi terancam. Dalam konteks inilah pelibatan pemuda menjadi strategis, karena pemuda memiliki energi, literasi digital, dan kapasitas inovasi yang dibutuhkan untuk menjaga daya saing desa wisata.

Pemberdayaan pemuda tidak hanya bermakna pemanfaatan tenaga kerja muda, melainkan proses memberikan kesempatan, kemampuan, dan kepercayaan kepada pemuda untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi. Pemberdayaan yang baik akan melahirkan regenerasi pengelola, yaitu proses pergantian dan pewarisan peran kepemimpinan secara terencana sehingga organisasi tidak bergantung pada satu generasi. Regenerasi inilah yang menjadi penopang keberlanjutan BUMDes dalam jangka panjang.

BUMDes Bhinor Energi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, menjadi kasus yang menarik untuk dikaji. BUMDes ini berdiri pada tahun 2016 dan berkembang menjadi pengelola desa wisata dengan unit usaha wisata snorkeling di Pantai Bohay, kafe kuliner hasil laut, dan pusat oleh-oleh produk lokal. BUMDes ini meraih penghargaan sebagai Juara Dua Lomba BUMDes tingkat Provinsi Jawa Timur dan Juara Pertama kategori Community Development and Engagement pada BUMDes Award 2020 yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pelibatan kelompok masyarakat, termasuk pemuda yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan kelompok pengawas masyarakat (POKMASWAS).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti kolaborasi multi-sektor dan tata kelola kelembagaan secara umum, penelitian ini memfokuskan kajian pada peran pemuda dan mekanisme regenerasi pengelola sebagai kunci keberlanjutan. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana pemberdayaan pemuda dan regenerasi pengelola dilakukan untuk menjamin keberlanjutan BUMDes Bhinor Energi sebagai pengelola desa wisata? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses pemberdayaan pemuda dan mekanisme regenerasi pengelola serta kontribusinya terhadap keberlanjutan BUMDes Desa Wisata.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (empowerment) merupakan upaya untuk mengembangkan, memandirikan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Mardikanto dan Soebiato (2015) menjelaskan pemberdayaan sebagai proses meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Friedmann (1992) dalam teori alternative development menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat melalui partisipasi aktif.

Dalam penelitian ini, analisis pemberdayaan pemuda mengacu pada kerangka lima dimensi keberdayaan yang dikemukakan oleh Suharto (2005), yang sering disebut sebagai “5P”, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Kelima dimensi ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Pemungkinan (enabling):** menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi pemuda berkembang secara optimal dengan membebaskan mereka dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. **Penguatan (empowering):** memperkuat pengetahuan dan kemampuan pemuda dalam memecahkan masalah serta memenuhi kebutuhannya melalui pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas.
- c. **Perlindungan (protecting):** melindungi pemuda, khususnya kelompok lemah, dari persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi, serta menjamin kesetaraan kesempatan berperan.
- d. **Penyokongan (supporting):** memberikan bimbingan dan dukungan agar pemuda mampu menjalankan peran dan tugasnya, sehingga tidak terjatuh dalam posisi yang semakin lemah.
- e. **Pemeliharaan (fostering):** memelihara kondisi yang kondusif agar keseimbangan distribusi peran tetap terjaga dan keberdayaan yang telah dicapai bersifat berkelanjutan.

2.2 Keberlanjutan dan Regenerasi Pengelolaan

Keberlanjutan (sustainability) merujuk pada kemampuan suatu organisasi untuk mempertahankan keberadaannya dan terus memberikan manfaat dalam jangka panjang. Elkington (1997) memperkenalkan konsep triple bottom line yang menempatkan keberlanjutan pada tiga pilar yang saling menopang, yaitu keberlanjutan ekonomi (profit), keberlanjutan sosial (people), dan keberlanjutan lingkungan (planet). Dalam konteks BUMDes desa wisata, keberlanjutan ekonomi tercermin dari kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), keberlanjutan sosial dari pelibatan dan kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan dari pelestarian ekosistem pesisir.

Regenerasi pengelola merupakan mekanisme penting untuk menjamin keberlanjutan tersebut. Regenerasi dipahami sebagai proses pewarisan peran, pengetahuan, dan tanggung jawab dari pengelola lama kepada pengelola baru, khususnya generasi muda, melalui tahapan rekrutmen, pembinaan dan transfer pengetahuan, serta estafet kepemimpinan. Regenerasi yang terlembaga menghindarkan organisasi dari ketergantungan pada figur tunggal dan memastikan kesinambungan tata kelola. Dengan demikian, pemberdayaan pemuda dan regenerasi pengelola berfungsi sebagai modal manusia (human capital) yang menopang ketiga pilar keberlanjutan BUMDes.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam proses pemberdayaan pemuda dan regenerasi pengelola pada BUMDes Bhinor Energi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman, dan persepsi para aktor yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Lokasi penelitian adalah BUMDes Bhinor Energi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, yang dipilih karena keberhasilannya bertahan dan berkembang serta memperoleh sejumlah penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen desa, laporan BUMDes, dan regulasi terkait. Penentuan informan dilakukan secara purposive, meliputi Ketua BUMDes Bhinor Energi, Kepala Desa Binor, pengurus POKDARWIS, pengelola muda unit usaha, serta pendamping dari program CSR. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi langsung di lokasi wisata, dan dokumentasi.

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis yang digunakan adalah lima dimensi pemberdayaan masyarakat menurut Suharto (2005) untuk membaca pemberdayaan pemuda, yang kemudian dikaitkan dengan konsep keberlanjutan dan regenerasi pengelola.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemberdayaan Pemuda dalam Pengelolaan BUMDes Bhinor Energi

Pada bagian ini, peneliti menganalisis pemberdayaan pemuda dalam pengelolaan BUMDes Bhinor Energi dengan menggunakan lima dimensi pemberdayaan masyarakat menurut Suharto (2005). Kelima dimensi tersebut, yaitu

pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dianalisis melalui indikator yang dikembangkan peneliti sebagai berikut:

a. *Pemungkinan (Enabling)*

Kemungkinan adalah upaya menciptakan iklim yang memungkinkan potensi pemuda berkembang. Dalam konteks BUMDes Bhinor Energi, dimensi ini tercermin dari dibukanya ruang partisipasi bagi pemuda desa untuk terlibat dalam pengelolaan unit usaha wisata. Pada awal pengembangan desa wisata, sebagian masyarakat menolak karena khawatir wisata akan merusak budaya dan lingkungan. Pemerintah desa dan pengelola BUMDes kemudian membuka kesempatan bagi pemuda untuk ikut mengelola kebersihan pantai, menjadi pemandu wisata, dan menjaga keamanan pengunjung, sehingga pemuda memiliki saluran untuk menyalurkan energi dan gagasannya secara produktif.

Ketua BUMDes Bhinor Energi, Abdul Komar, menyatakan bahwa:

“Sejak awal kami sadar bahwa desa wisata ini tidak akan jalan kalau hanya dikelola orang-orang tua. Maka kami beri ruang kepada pemuda desa untuk ikut, mulai dari menjaga loket, memandu snorkeling, sampai mengelola media sosial. Kami percaya anak-anak muda ini punya ide segar. Tugas kami menyediakan tempat dan kesempatan, biar mereka berani tampil dan merasa ikut memiliki BUMDes ini.”

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa BUMDes Bhinor Energi telah menciptakan iklim yang memungkinkan pemuda berkembang melalui pembukaan akses partisipasi dalam berbagai lini pengelolaan. Berdasarkan indikator kemungkinan, sekitar 65% pengelola aktif unit usaha wisata BUMDes berasal dari kelompok pemuda, yang menunjukkan bahwa ruang partisipasi telah terbuka cukup luas. Meskipun demikian, partisipasi ini masih perlu diperkuat dengan pelembagaan agar tidak bergantung pada inisiatif personal pengurus.

b. *Penguatan (Empowering)*

Penguatan merujuk pada upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemuda. Pada BUMDes Bhinor Energi, dimensi ini diwujudkan melalui pelatihan dan pendampingan yang sebagian besar difasilitasi oleh program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. PJB UP Paiton dan PT. YTL serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Probolinggo. Pelatihan mencakup manajemen pariwisata, pelayanan pelanggan, pengelolaan kafe oleh barista dan koki, serta pemasaran digital. Beberapa pemuda juga diikutsertakan dalam studi banding ke BUMDes yang telah berhasil seperti BUMDes Tirta Mandiri.

Salah satu pengelola muda unit kafe dan media sosial, Rian, menuturkan bahwa:

“Saya dulu cuma lulusan SMA dan tidak tahu apa-apa soal mengelola usaha. Setelah ikut pelatihan dari CSR dan studi banding, saya jadi

paham cara melayani tamu, bikin konten promosi di Instagram, sampai mengatur stok di kafe. Sekarang malah saya yang sering mengajari teman-teman baru. Ilmu ini benar-benar mengubah cara saya bekerja dan bikin saya lebih percaya diri.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pemuda berlangsung efektif melalui pelatihan berbasis CSR dan pembelajaran antarpemuda. Berdasarkan indikator penguatan, sekitar 70% pemuda yang dilibatkan menyatakan mengalami peningkatan keterampilan yang berdampak langsung pada pekerjaan mereka di unit usaha. Penguatan ini juga melahirkan inovasi layanan, seperti pemasaran digital dan penyelenggaraan live music akhir pekan, yang meningkatkan kunjungan wisatawan.

c. *Perlindungan (Protecting)*

Perlindungan adalah upaya melindungi pemuda dari persaingan yang tidak seimbang dan menjamin kesetaraan kesempatan. Pada BUMDes Bhinor Energi, dimensi ini tampak dari pengaturan agar pemuda lokal memperoleh prioritas dalam pengelolaan unit usaha, sehingga peluang ekonomi tidak diambil alih oleh pihak luar. BUMDes juga mendampingi pemuda dalam menghadapi resistensi awal masyarakat dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai penengah, sehingga pemuda yang aktif tidak menghadapi tekanan sosial sendirian.

Kepala Desa Binor, Hj. Hostifawati, menyatakan bahwa:

“Kami selalu menekankan bahwa yang harus diutamakan adalah anak-anak desa sendiri. Jangan sampai wisata maju, tapi yang menikmati orang luar. Maka, kalau ada unit usaha baru, pemuda desa yang kami dahulukan. Kalau ada yang sempat diprotes karena dianggap melanggar kebiasaan, kami pasang badan bersama tokoh masyarakat supaya mereka tetap nyaman bekerja.”

Berdasarkan keterangan tersebut, BUMDes Bhinor Energi telah menjalankan fungsi perlindungan dengan memberikan prioritas dan dukungan sosial bagi pemuda lokal. Berdasarkan indikator perlindungan, sekitar 60% peluang kerja dan usaha pada unit-unit BUMDes diisi oleh pemuda desa setempat. Meskipun demikian, perlindungan ini masih bersifat informal dan belum dituangkan dalam aturan tertulis seperti Peraturan Desa, sehingga jaminan kesetaraan kesempatan bagi pemuda perlu diperkuat secara formal.

d. *Penyokongan (Supporting)*

Penyokongan merupakan pemberian bimbingan dan dukungan agar pemuda mampu menjalankan perannya. Dimensi ini terlihat dari pendampingan berkelanjutan yang diberikan pengurus senior BUMDes, pemerintah desa, dan mitra CSR kepada pemuda dalam menjalankan unit usaha. Dukungan juga

Majalah Ilmiah “**CAHAYA ILMU**” Vol. 8 No. 1 Pebruari 2026

berbentuk penyediaan sarana dan prasarana, seperti warung, gazebo, dan kafe, yang menjadi tempat pemuda berkarya, serta pemberian kepercayaan untuk memegang tanggung jawab operasional harian.

Pengurus POKDARWIS, Saiful, menyampaikan bahwa:

“Pemuda di sini tidak dilepas begitu saja. Kalau ada yang baru memegang tanggung jawab, selalu didampingi yang lebih senior dulu sampai benar-benar bisa. Pengurus BUMDes dan pemerintah desa juga gampang diajak berdiskusi kalau kami menghadapi kendala. Jadi kami merasa disokong, bukan cuma disuruh kerja.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyokongan berjalan melalui pendampingan berjenjang dan penyediaan fasilitas. Berdasarkan indikator penyokongan, sekitar 75% pemuda pengelola menyatakan memperoleh bimbingan yang memadai dari pengurus senior dan pemerintah desa. Pola pendampingan berjenjang ini sekaligus menjadi sarana transfer pengetahuan yang penting bagi proses regenerasi pengelola.

e. Pemeliharaan (Fostering)

Pemeliharaan adalah upaya menjaga keberdayaan yang telah dicapai agar bersifat berkelanjutan. Pada BUMDes Bhinor Energi, dimensi ini diwujudkan melalui pelibatan pemuda secara terus-menerus dalam kegiatan rutin, seperti pemeliharaan kebersihan pantai, pengawasan terumbu karang bersama POKMASWAS, serta penyelenggaraan kegiatan wisata berkala. Keterlibatan yang berkelanjutan ini menumbuhkan rasa memiliki dan memastikan bahwa pemuda tetap menjadi bagian dari pengelolaan, bukan hanya pada satu periode.

Pengelola muda unit wisata, Rian, menambahkan bahwa:

“Kami tidak hanya bekerja saat ramai pengunjung saja. Setiap minggu ada jadwal bersih pantai, jaga terumbu karang, dan rapat evaluasi. Karena terus dilibatkan, kami merasa BUMDes ini juga milik kami, jadi kami jaga supaya tidak mati di tengah jalan seperti desa wisata lain.”

Berdasarkan keterangan tersebut, BUMDes Bhinor Energi telah memelihara keberdayaan pemuda melalui pelibatan rutin dan penumbuhan rasa kepemilikan. Berdasarkan indikator pemeliharaan, sekitar 70% pemuda yang terlibat bertahan aktif lebih dari dua tahun, yang menunjukkan tingkat retensi yang cukup baik. Pemeliharaan inilah yang menjadi jembatan menuju regenerasi pengelola dan keberlanjutan BUMDes.

4.2 Regenerasi Pengelola dan Keberlanjutan BUMDes Desa Wisata

Pemberdayaan pemuda yang berlangsung melalui kelima dimensi di atas bermuara pada terbentuknya mekanisme regenerasi pengelola. Regenerasi pada BUMDes Bhinor Energi berlangsung melalui tiga tahapan. Pertama, rekrutmen, yaitu perekrutan pemuda desa untuk mengisi posisi pada unit-unit usaha melalui jalur POKDARWIS dan rekomendasi tokoh masyarakat. Kedua, pembinaan dan transfer pengetahuan melalui pelatihan berbasis CSR dan pendampingan berjenjang dari pengurus senior. Ketiga, estafet tanggung jawab, yaitu pemberian kepercayaan kepada pemuda untuk memegang tanggung jawab operasional dan, secara bertahap, posisi kepengurusan.

Regenerasi tersebut berkontribusi terhadap ketiga pilar keberlanjutan sebagaimana konsep Triple Bottom Line (Elkington, 1997). Pada pilar ekonomi, keterlibatan pemuda mendorong inovasi layanan dan pemasaran digital yang meningkatkan kunjungan wisata serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Pada pilar sosial, regenerasi membuka lapangan kerja bagi pemuda desa, mengurangi urbanisasi, dan memperkuat kohesi sosial. Pada pilar lingkungan, pelibatan pemuda dalam pengawasan terumbu karang dan kebersihan pantai menjaga kelestarian ekosistem pesisir yang menjadi modal utama desa wisata.

Ketua BUMDes Bhinor Energi, Abdul Komar, menegaskan bahwa:

“Cita-cita kami, BUMDes ini harus bisa jalan terus walau pengurusnya berganti. Maka kami siapkan anak-anak muda dari sekarang. Sudah ada beberapa yang dulu hanya jaga loket, sekarang sudah memimpin unit usaha. Kalau regenerasi ini berhasil, kami yakin desa wisata ini akan bertahan lama.”

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dilihat bahwa keberlanjutan BUMDes Bhinor Energi mencapai tingkat yang relatif baik, dengan sekitar 65% posisi pengelola telah diisi oleh generasi muda dan beberapa di antaranya telah menepati posisi kepemimpinan unit usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan pemuda dan regenerasi pengelola berjalan saling menguatkan dalam menopang keberlanjutan desa wisata, meskipun pelembagaan kaderisasi secara formal masih perlu diperkuat.

Gambar 1. Unit Usaha Wisata Pantai Bohay yang Dikelola Pemuda



Sumber : Peneliti (2026)

Gambar 2. Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pemuda Pengelola BUMDes



Sumber: <https://probolinggokab.go.id/disporapar-berikan-pelatihan-pengelolaan-desa-wisata-2/>

4.3 Tantangan dan Hambatan dalam Pemberdayaan Pemuda dan Regenerasi Pengelola

Meskipun pemberdayaan pemuda dan regenerasi pengelola pada BUMDes Bhinor Energi telah berjalan, terdapat sejumlah tantangan dan hambatan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Belum adanya kaderisasi formal. Proses regenerasi masih banyak bergantung pada inisiatif personal pengurus dan belum dituangkan dalam

mekanisme kaderisasi tertulis maupun Peraturan Desa, sehingga rawan terputus ketika kepengurusan berganti.

- b. Keterbatasan insentif bagi pemuda. Sebagian pemuda menghadapi dilema antara bekerja di BUMDes dan mencari penghasilan yang lebih pasti di luar desa, sehingga jaminan insentif dan jenjang karier menjadi penting untuk menjaga retensi.
- c. Risiko urbanisasi pemuda. Daya tarik bekerja di kota tetap menjadi ancaman bagi keberlanjutan regenerasi, terutama bagi pemuda dengan kompetensi tinggi yang telah memperoleh pelatihan.
- d. Ketergantungan pada mitra eksternal. Penguatan kapasitas pemuda masih sangat bergantung pada program CSR perusahaan, sehingga keberlanjutannya rentan apabila dukungan mitra berkurang.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan pemuda dan regenerasi pengelola merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan BUMDes Bhinor Energi sebagai pengelola desa wisata. Pemberdayaan pemuda berlangsung melalui lima dimensi keberdayaan, yaitu pemungkinan berupa pembukaan ruang partisipasi, penguatan melalui pelatihan berbasis CSR, perlindungan melalui prioritas kesempatan bagi pemuda lokal, penyokongan melalui pendampingan berjenjang, dan pemeliharaan melalui pelibatan rutin yang menumbuhkan rasa memiliki. Sekitar 65% pengelola aktif BUMDes berasal dari kelompok pemuda, dengan tingkat retensi dan peningkatan keterampilan yang cukup baik.

Pemberdayaan tersebut bermuara pada mekanisme regenerasi pengelola melalui tahapan rekrutmen, pembinaan dan transfer pengetahuan, serta estafet tanggung jawab, yang menopang keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan desa wisata. Meskipun demikian, keberlanjutan ini masih menghadapi tantangan berupa belum adanya kaderisasi formal, keterbatasan insentif, risiko urbanisasi pemuda, dan ketergantungan pada mitra eksternal. Oleh karena itu, direkomendasikan agar BUMDes dan pemerintah desa melembagakan kaderisasi pengelola melalui aturan tertulis, menyediakan jenjang karier dan insentif yang memadai bagi pemuda, serta membangun kemandirian program peningkatan kapasitas agar regenerasi dan keberlanjutan BUMDes Desa Wisata dapat terjamin dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2015). *Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas: Pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis* (Edisi Revisi). Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Majalah Ilmiah “**CAHAYA ILMU**” Vol. 8 No. 1 Februari 2026

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Oxford: Capstone Publishing.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From national systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. Cambridge: Blackwell.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta.
- Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. (2015). *Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta.
- Rohim, Taufiq, M. (2025). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa melalui pemberdayaan masyarakat. *Proceeding International Conference on Economics, Business and Information Technology*, 6.
- Rohim, Sunarto, I., & Imama, V. R. (2022). Penguatan tata kelola BUMDes melalui sinergi Quadruple Helix dalam pengembangan desa wisata. *Jurnal Penelitian Ipteks*, 7(1), 1–10.
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: Refika Aditama.